



**SKRIPSI**

**PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG (STUDI PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UIVERSITAS MUHAMMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

**PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG (STUDI PADA APLIKASI  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penerapan *E-Government* Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi sistem informasi manajemen kependudukan).

Nama Mahasiswa

: Yahya

Nomor Stambuk

: 105641115817

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing I



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

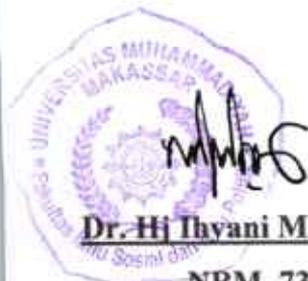
Pembimbing II



Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Mengetahui,

Dekan

Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Ketua Program Studi



Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163

## PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekam Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 059/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari jumat 5 Agustus 2022.



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si  
NMB : 730727

A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si  
NMB : 292797

PENGUJI

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua) (.....)
2. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si. (.....)
3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si. (.....)
4. Hardianto Hawing, S.T., M.A (.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yahya

Nomor Stambuk : 105641115817

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 1 Agustus 2022

Yang menyatakan



Yahya

## ABSTRAK

**Yahya 2022. Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan).** Dibimbing oleh Rudi Hardi selaku pembimbing I dan Nur Khaerah selaku pembimbing II.

Menerapkan *E-Government* pada era modern saat ini harus mementingkan teknologi informasi sehingga dalam pelayanan publik secara online dapat lebih efektif dan efisien. Untuk menerapkan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memerhatikan tentang bagaimana elemen-elemen untuk menerapkan *E-Government*.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan 3 elemen dalam menerapkan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yaitu: 1). Elemen Support adanya dukungan dan keinginan dari pimpinan Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dalam menerapkan *E-Government* dan dengan adanya aturan yang mendukung dalam menerapkan *E-Government*. 2). Elemen Capacity yang meliputi dengan tersedianya sumber daya finansial yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, tersedianya sumber daya infrastruktur yang mendukung dalam menerapkan *E-Government* seperti computer, wifi, print dan yang lain, dan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang mempuni untuk melaksanakan *E-Government* atau pelayanan kepada masyarakat secara online. Dan yang ke 3). Adalah Elemen value yang merupakan manfaat yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sebagai yang memberikan pelayanan online kepada masyarakat yang dalam menerapkan *E-Government* memberikan dampak manfaat yang besar dari segi inovasi pelayanan yang efektif dan efisien pada saat sekarang ini di instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, sedangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai yang menerima pelayanan yaitu adanya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan karna tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan terlebih yang jauh dari kantor.

Kata Kunci : *Elemen Penerapan, E-Government, Enrekang*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Laupa dan Ibunda Nuraeni selaku orang tua atas segala pengorbanan yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan dengan ikhlas , memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

3. Bapak Ahmad Harakan selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.IP. M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (2018-2022).
5. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, Staf atau operator Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, Masyarakat yang telah senantiasa memberikan informasi mengenai Penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.
9. Teman-teman IP Angkatan 017 yang selama ini selalu menemani, membantu, memberikan semangat serta dukungannya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Teman kelas IP E 017 yang selalu menemani mulai awal kuliah hingga saat ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 1 Agustus 2022



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENERIMA TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II</b> .....	7
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori .....	9
C. Elemen Penerapan <i>E-Government</i> .....	25
D. Kerangka Pikir.....	28
E. Fokus Penelitian.....	29
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	29
<b>BAB III</b> .....	31
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	31
B. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Informasi Penelitian .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Teknik Pengabsahan data.....	35

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
B. Elemen penerapan <i>E-Government</i> di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.....	46
C. Hasil Pembahasan.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
LAMPIRAN	



## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Electronic Government* atau *e-government* merupakan bentuk implementasi yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. *E-government* merupakan upaya pengembangan manajemen *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit-belit dan ketidakpastian berusaha mengatasinya dengan penerapan *e-government*. Dalam paradigma *e-government*, pemberian pelayanan kepada publik tidak lagi diselesaikan melalui dokumen dan interaksi personal, melainkan melalui sarana elektronik, sehingga tidak ada lagi interaksi personal dalam pemberian layanan. Orientasi efisiensi biaya produksi dalam pemberian layanan telah bergeser ke orientasi yang menekankan pada fleksibilitas, pengawasan, dan kepuasan pengguna (Ridwan & Nurhakim, 2014).

Perkembangan teknologi informasi yang sering disebut dengan *e-government* sebagai bagian dari globalisasi tidak terlepas dari masyarakat modern, karena masyarakat saat ini lebih terbuka terhadap kebutuhan pemerintah sebagai penyedia layanan, melaksanakan tanggung jawab pemerintah secara lebih efektif dan efisien, dan memberikan akses informasi yang nyaman, terutama informasi tentang pemerintah (Angguna & Gani, 2015).

*E-government* di Indonesia diperkenalkan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika, yang menetapkan bahwa pejabat pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi. Selain itu, mengenai *e-government*, pada tahun 2003 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Jaksa Agung, Gubernur Jenderal, dan Walikota dari Bupati Indonesia dan Republik Indonesia mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing untuk melaksanakan pembangunan *e-government* nasional (Yulinar Ayu Setiani, Dra. Maesaroh, 2016).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tentang Otonomi Daerah Tahun 2014 mendorong setiap daerah untuk bekerja keras meningkatkan citra, kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan tentunya kualitas pelayanan publik. Penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan diyakini dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pembuatan *website/website* pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam mengembangkan konsep *e-government*. Dengan demikian, pemangku kepentingan/stakeholder dapat memperoleh informasi lebih cepat dan melakukan pelayanan public dengan baik (Adibowo & Putri, 2016).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tentang Otonomi Daerah Tahun 2014 mendorong setiap daerah untuk bekerja keras meningkatkan citra, kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan tentunya kualitas pelayanan

publik. Penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan diyakini dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pembuatan website/website pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam mengembangkan konsep *e-government*. Dengan demikian, pemangku kepentingan/stakeholder dapat memperoleh informasi lebih cepat dan melakukan pelayanan publik (Nugraha, 2018).

Mendorong penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan yang baik, penggunaan sistem informasi telah menemukan tempat yang harmonis dalam organisasi instansi pemerintah. Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan prasyarat bagi organisasi sektor publik untuk mendapatkan kepercayaan publik, mereka harus mengkoordinasikan pelaksanaan dan proses kerja dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing lembaga dan memperkuat kerangka kebijakan untuk memastikan bahwa mereka terintegrasi ke dalam jaringan sistem manajemen. Metode ini diperlukan untuk mengkoordinir dua kepentingan yang saling berkaitan. Kepentingan tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kepentingan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan *e-government*. pemerintah kapan saja dan di mana saja. *E-government* dapat diakses juga dapat mencapai pelayanan publik yang lebih cepat (Mariano, 2019).

Salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bertanggung jawab memberikan pelayanan terkait pengurusan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) atau akta kelahiran kepada masyarakat, dan permintaannya terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat selalu meminta birokrat untuk memberikan pelayanan publik yang baik, meskipun kebutuhan tersebut seringkali tidak memenuhi harapan, karena pelayanan publik yang terjadi pada kenyataannya masih rumit, lambat, mahal dan melelahkan. Alasan tren ini adalah masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani daripada pihak yang dilayani.

Oleh karena itu, secara fundamental perlu dilakukan pembenahan pelayanan publik, melalui pembekalan kembali aparatur pelayanan dalam arti yang sebenarnya. Pelayanan yang seharusnya berorientasi kepada publik terkadang menjadi pelayanan publik bagi negara, walaupun sebenarnya negara itu ada untuk kemaslahatan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi e-government adalah pengelolaan pendaftaran kependudukan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten. Dalam proses pelaksanaannya, desa/kelurahan merupakan pimpinan pencatatan kependudukan sampai setiap warga negara secara administratif terdaftar sebagai warga negara Indonesia, sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan.

Pelaksanaan ternyata didapati berbagai kelemahan (sistem informasi manajemen kependudukan) sebagai sebuah sistem yang dibangun untuk mengelola data-data dalam sistem kependudukan yang ada di suatu instansi, seperti kelurahan, kecamatan maupun dinas pencatatan sipil. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-

data mengenai penduduk. Seperti yang terdapat di Kabupaten Enrekang, ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda.

Masih banyak kekurangan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak puas dan mengeluhkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Banyak warga yang mengeluhkan layanan ini, salah satunya layanan KTP elektronik, karena petugas tidak tepat waktu di loket antrian. Masalah selanjutnya adalah keterlambatan pencetakan KTP karena koneksi jaringan yang buruk.

Penerapan *e-government* di instansi pemerintah bisa pula dijadikan sebagai cara yang tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan factor-faktor yang mendukung suksesnya

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti berinisiatif melakukan sebuah penelitian yang berjudul "**Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi sistem informasi manajemen kependudukan).**"

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah telah disampaikan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana penerapan *e-government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

## **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah yang telah diajukan menjadi dasar bahwa tujuan penelitian ini, adalah unttuk mengetahui penerapan *e-government* Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah dalam membuat program-program dan juga sebagai referensi penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik untuk pengelolaan program sesuai dengan tujuan utama pemerintah. Penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari beberapa sumber penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti pada judul penelitian penulis. Penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai tambahan informasi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis. Pada penelitian ini penulis mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Judul Penelitian :. Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern

Hasil Penelitian :. Kemajuan komunikasi dan informasi melalui internet telah membuka kesempatan yang semakin luas hubungan antara politik, demokrasi dan masyarakat. *E-government* adalah salah satu cara dalam mewujudkan proses politik agar lebih partisipatif dan demokratis. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Perkembangan teknologi internet telah meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan pelayanan dengan lebih murah, mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, dan mampu bekerja lebih cepat (Ridwan & Nurhakim, 2014).

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penerapan *e-government* di instansi pemerintahan. Yang menjadi perbedaan penelitian yang kami laksanakan lebih mengarah pada penerapan *e-government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

2. Judul Penelitian: Elemen Sukses Pelaksanaan E-Government Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Pekan Baru

Hasil Penelitian Penelitian ini berkontribusi pada literatur dimana menunjukkan elemen-elemen sukses yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan yang memberikan berbagai keuntungan baik peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial salah satunya kemiskinan. Dalam implementasi *e-government* dibutuhkan elemen-elemen yang bila di sederhanakan terdiri dari tiga elemen yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value* (Cantika & Rfs, 2021).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diva Cantika membahas tentang penerapan *e-government* di Instansi pemerintahan begitu pula dengan penelitian kali ini membahas mengenai penerapan *e-government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Namun dalam perbedaan penelitian ini ada sedikit perbedaan yaitu dalam penelitian Diva Cantika lebih mengarah kepada pelaksanaan sukses *e-government* dalam penanggulangan kemiskinan, namun dalam penelitian ini lebih fokus pada penerapan *e-goverement* di kabupaten Enrekang.

3. Judul Penelitian : E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman).

Hasil Penelitian : Kesepakatan bersama untuk menerapkan e-government. Pemahaman informan mengenai konsep *e-government* sudah cukup baik. Mereka meyakini bahwa penerapan *e-government* dalam pelayanan publik akan menjadi lebih efektif dan efisien. Tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pihak yang memiliki inisiatif mengimplementasikan *e-government* ialah harus tetap dapat meyakinkan mereka yang tidak bisa atau Kesepakatan bersama untuk menerapkan *e-government*. Pemahaman informan mengenai konsep *e-government* sudah cukup baik (Joko Tri Nugraha, 2018).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Nugraha membahas penerapan *e-government*, begitu pula dengan penelitian ini yang membahas tentang penerapan *e-government*.

Namun dalam persamaan di atas tentunya memiliki perbedaan, yang menjadi perbedaan penelitian kami lebih mengarah pada penerapan *e-government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Enrekang.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep *e-government*

*E-government* adalah sebuah bentuk media komunikasi, dimana definisi dari media menurut Marshall McLuhan dalam bukunya *Understanding Media*,

menyatakan bahwa media itu *The Extension of Man* (media itu perluasan manusia) (Noveriyanto et al., 2018).

Ada banyak definisi istilah *e-government*, dan menurut Bank Dunia, *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi komunikasi di instansi pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya untuk menjalin hubungan yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat merespon secara lebih efisien, efektif, dan efektif. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh melalui *e-government* adalah terciptanya pemerintahan yang baik, pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, peningkatan pendapatan negara dan/atau pengurangan biaya (Hardjaloka, 2014).

*E-Government* juga merupakan sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi baru untuk melayani masyarakat akses terhadap informasi dan pelayanan pemerintah dengan nyaman, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk menyediakan kesempatan yang lebih besar dalam berpartisipasi pada proses dan institusi demokratis (Irawan, 2013).

Definisi *e-government* telah dikemukakan oleh berbagai sumber. Beberapa ahli memiliki definisi yang berbeda tetapi mengacu pada arti yang sama, yaitu organisasi pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menjalankan tugasnya mengelola pemerintahan dan menyediakan layanan publik. Penggunaan dalam konteks ini meliputi penggunaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan komputer untuk memudahkan komunikasi dan mengatur proses bisnis. Melalui *e-government*,

informasi dan layanan pemerintah dapat disediakan secara online melalui internet dan media digital lainnya. Karakteristik internet dan media digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan e-government kapan saja dan di mana saja. *E-government* juga memungkinkan interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk saling berbagi informasi (Purwaningsih, 2017).

*E-government* pada dasarnya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang baru bagi pemerintah. Dapat digunakan untuk manajemen pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Ini melibatkan masalah prosedural Otomatisasi dan komputerisasi. Pendekatan berbasis kertas untuk mendorong gaya kepemimpinan baru, mendiskusikan dan merumuskan strategi, transaksi bisnis, mendengarkan pendapat warga dan komunitas, dan mengatur dan mengkomunikasikan informasi (Dede Abdurahman, 2018).

## **2. Manfaat *e-government***

Penggunaan teknologi internet di bidang pemerintahan disebut *e-government*. Secara sederhana *e-government* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan teknologi informasi. Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia, *e-government* berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih efektif. Seiring waktu, hasil implementasi *e-*

*government* telah beragam. Di negara-negara maju, penerapan sistem *e-government* di lingkungan pemerintahan telah membawa terobosan dari efisiensi prosedur administrasi birokrasi hingga munculnya inovasi di sektor pelayanan publik (Sudarsono & Lestari, 2018).

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dengan penerapan *e-government* yakni (Irawan, 2013) :

1. *E-government* meningkatkan efisiensi, teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi penanganan sejumlah tugas yang besar dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat mengumpulkan dan mengirimkan data penyimpanan, memberikan informasi, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Melalui lebih banyak berbagi data dengan dan antar pemerintah, efisiensi masa depan yang lebih signifikan dapat dicapai.
2. *E-government* meningkatkan layanan, jika pemerintah ingin memperhatikan pengguna, ini berarti pengguna tidak harus memahami struktur dan hubungan tata kelola yang kompleks untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat memudahkan pemerintah untuk menjadi organisasi yang bersatu dan menyediakan layanan online untuk membantu mencapai tujuan ini. Layanan *e-government* harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dan nilai bagi pengguna sebagai bagian dari strategi layanan multi-saluran.
3. *E-government* dapat membantu mencapai hasil kebijakan tertentu. Internet dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide,

sehingga berkontribusi pada hasil kebijakan tertentu. Misalnya, informasi online dapat menyebarluaskan penggunaan program pendidikan atau pelatihan, berbagi informasi dalam sektor kesehatan dapat meningkatkan penggunaan sumber daya dan perawatan pasien, dan berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempromosikan kebijakan lingkungan

4. *E-government* dapat berkontribusi pada tujuan kebijakan ekonomi; *e-government* dapat membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan kepada pemerintah, dan membantu mencapai tujuan kebijakan ekonomi. Dampak khusus termasuk pengurangan pengeluaran pemerintah melalui rencana yang lebih efektif dan efisien, dan penyederhanaan pengelolaan administrasi melalui teknologi informasi dan komunikasi dan peningkatan informasi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas bisnis.
5. *E-government* dapat menjadi promotor utama reformasi, teknologi informasi dan komunikasi mendukung reformasi di banyak bidang, seperti melalui peningkatan transparansi, berbagi informasi, dan inkonsistensi internal.
6. *E-government* dapat membantu kepercayaan antara pemerintah dan warga negara; membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara adalah dasar dari pemerintahan yang baik. Teknologi informasi dan komunikasi membantu membangun kepercayaan dengan mempromosikan partisipasi warga negara dalam proses kebijakan, mempromosikan

pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, dan membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika pembatasan dan tantangan dapat diatasi, *e-government* dapat membantu mendengar suara individu dalam debat yang lebih luas.

Implementasi *e-government* memiliki begitu banyak manfaat terlebih untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah (Wirawan, 2020):

1. Mengurangi biaya: Dibandingkan dengan layanan manual, menyediakan layanan online dapat secara signifikan mengurangi total biaya administrasi, hubungan dan interaksi antara pemerintah dan pemangku kepentingan.
2. Mendukung pembangunan ekonomi: Teknologi dapat mendorong pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang positif dengan menyederhanakan tahapan administrasi atau mengurangi birokrasi. Selain itu, ada dampak ekonomi secara langsung, misalnya dalam proses *e-procurement* atau *e-auction* akan menimbulkan persaingan yang lebih luas dan peserta yang lebih banyak.
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas: Penerapan *e-government* dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good governance*. *E-government* membantu meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses dan pelacakan online untuk publik.

4. Meningkatkan layanan kepada masyarakat: *e-government* dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan Anda dapat memperoleh informasi dari pemerintah tanpa harus mendatangi kantor pemerintah secara langsung. Materi informasi ini tersedia 24 jam sehari 7 hari seminggu, tanpa bergantung pada jam kerja kantor pemerintah.
  5. Memberdayakan Masyarakat : Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan Melalui Informasi Yang Mudah Diperoleh Yang Kemudian Memungkinkan Masyarakat Dan Pihak-Pihak Lain Sebagai Mitra Pemerintah Terlibat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Atau Kebijakan Publik Secara Merata Dan Demokratis.
  6. Fasilitas *E-Society* : Salah satu manfaat utama dari inisiatif *e-goveement* terdiri dari promosi penggunaan ICT di sektor lain. Kapasitas teknologi dan manajemen yang diperlukan untuk administrasi *e-government* mendorong pengembangan kursus dan modul pelatihan baru di sekolah dan Universitas yang berusaha memasok yang diperlukan keterampilan dan kapabilitas ke pasar kerja.
- beberapa manfaat dari dimensi pemerintahan lainnya dari pelaksanaan *e-Government* antara lain (Sudarsono & Lestari, 2018).

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.

2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
7. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.

Pada dasarnya tujuan strategis pengembangan *E-Government* menurut inpress no 3 tahun 2003 (Supriyanto, 2016):

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi oleh sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan yang interaktif dengan dunia usaha

- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah.

### 3. Tipe *e-government* dalam pemerintahan

*E-government* adalah penggunaan merupakan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi informasi merupakan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Terdapat 4 (empat) tipe relasi dari *e-government* (Adibowo & Putri, 2016) :

#### a. *Government to Citizen*

Tipe ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

#### b. *Government to Business*

Relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis yang bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, yang juga dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

#### c. *Government to Government*

Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar pejabat negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain- lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air. Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya; Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal); Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain sebagainya.

d. *Government to Employees*

ialah hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para

pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

e. *Government to Non Profit*

Ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan lembaga atau dengan Non Profit, seperti NGO, partai politik dan lain-lainya. Hubungan ini bertujuan sehingga lembaga atau institusi non pemerintah dapat dikelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing dengan aturan yang berlaku.

**4. Penerapan *e-government***

Untuk mengembangkan *e-government* ada empat fase yang diusulkan oleh World Bank (2002), yakni *Presence* (kehadiran), *Interaction* (interaksi), *Transaction* (transaksi) dan *Transformation* (transformasi). Model yang sama dikemukakan oleh Gartner Research (Gupta, 2004), mengajukan model *The Value Chain of E-Service*, yang menetapkan empat tahap yang secara khusus dikembangkan dalam konteks *e-governance*. Keempat fase pengembangan tersebut jika dikontekskan untuk pengembangan situs web *e-government* di Indonesia, meliputi: (1) Kehadiran, yaitu memunculkan situs web daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam situs web pemerintah; (2) Interaksi, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam situs web pemerintah; (3) Transaksi,

yaitu web pemerintah daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah; (4) Transformasi, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi (Nugraha, 2018).

Melalui pengembangan *e-government*, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan optimalikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang saling berkaitan, yaitu, (Supriyanto, 2016):

- a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Menurut (Indrajit, 2006) untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen penerapan *e-government* yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen dalam penerapan tersebut adalah:

1. *Support* (dukungan)

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar

mengikuti tren. Tanpa adanya unsur political will dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government akan sulit berjalan.

Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan politis) untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari e-government. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action).

Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus. Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top-down (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi program e-government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungan verbal semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk:

- a. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.

- c. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
- d. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government (seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga lembaga khusus, misalnya Detiknas di Indonesia sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya), dan
- e. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang simpatik.

## 2. *Capacity* (kapasitas)

Adalah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk membangun dan penerapan *E-Government* sehingga konsep yang sudah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government*.

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

### 3. *Value* (manfaat)

Berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *e-government*. Dalam elemen *value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *e-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan. Untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya (Anggana & Gani, 2015).

### 5. Sistem Informasi Manajemen *E-Government*

Menurut Turban, McLean, dan Wetherbe dalam Kadir (2003), sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan dalam penerapan *e-government* (Gea Cita Meiratri, Bambang Irawan, 2020).

E-Government atau pemerintahan elektronik merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Semua sistem sudah terdigitalisasi

yang memungkinkan terintegrasinya pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Indrajit dalam Pratiwi & Muslihudin (2018:24), E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan kepentingan publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public (Cantika & Rfs, 2021).

Penerapan *E-Government* memerlukan sumber daya finansial yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan masyarakat. Adanya *E-Government* di lingkungan pemerintah sangat diperlukan, karena tuntutan kan membentuk pemerintahan yang bersih, efektif, efisien efisien dan transparan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, banyak pemerintah yang memanfaatkan teknologi sebagai dasar strategi untuk memenuhi keinginan publik dalam hal sistem informasi manajemen dan mengarah untuk dapat memberikan pelayanan public (Nadila Olivia Intan Putri, 2018).

Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah mempunyai arti bagi penerimanya dan dapat mendukung manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mendukung penerapan *e-government*. Menurut Sutabri (2003:18) mengemukakan informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Darmawan, 2015).

Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu : Komponen Sistem, Batasan Sistem, Lingkungan Luar Sistem, Penghubung Sistem, Masukan Sistem, Keluaran Sistem, Pengolahan Sistem dan Sasaran Sistem. Sistem informasi adalah kombinasi dari setiap unit dikelola orang (orang), hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), jaringan komputer dan jaringan komunikasi data (komunikasi), dan database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang yang bentuk organisasi (Ahmad Sobri, 2019).

Menurut James A.F.Stoner (dalam Hariani, 2013:6) mendefinisikan, Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya, manajemen bukan hanya itu, dan tidak ada satu definisi pun yang dapat diterima secara universal (Nadila Olivia Intan Putri, 2018).

### **C. Elemen Penerapan *E-Government***

Indrajit (2012: 61-68) dalam bukunya menjelaskan hasil riset dari *University of Maryland* terdapat beberapa elemen sukses yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek *e-government*. Berdasarkan hasil riset tersebut diperoleh delapan elemen sukses yang berperan dalam manajemen proyek *e-government* yaitu sebagaimana berikut :

1. Pertama, *Political Environment* (lingkungan politik) , adalah keadaan atau situasi dimana proyek tersebut di implementasikan.
2. Elemen sukses yang kedua adalah *Leadership* (kepemimpinan), Peran pemimpin sangat penting untuk menjadi manajer yang baik, pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang profesional, meningkatkan kredibilitas pegawainya, dan mengawal proyek dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi termasuk tekanan dari pihak manapun.
3. Elemen sukses ketiga yaitu *Planning* (perencanaan). Perencanaan yang disusun dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar dalam implementasi dan kesuksesan program *e-government*.  
Elemen sukses yang keempat, yaitu *Stakeholder* (pemangku kepentingan). Adalah pihak-pihak yang mempunyai berbagai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi proyek terkait. *Stakeholders* dalam utama antara lain : pemerintah dengan semua perangkat kerjanya, misalnya pihak masyarakat, pihak swasta, pihak lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
4. Elemen sukses yang kelima adalah *Transparancy*, yang dimaksud disini adalah bagaimana ketersediaan data mengenai proyek tersebut. Sehingga dengan ketersediaan tersebut, akan memudahkan seluruh *stakeholders* dalam mengakses informasi dan bisa memonitoring segala hal yang dibutuhkan. Disinilah akan terlihat keseriusan pemerintah dalam menjalankan proyek ini.

5. Elemen sukses yang keenam, *Budgets* (anggaran). Merupakan salah satu sumber daya finansial yang dianggarkan dalam sebuah proyek yang menjadi kekuatan yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proyek di implementasikan.
6. Elemen sukses yang ketujuh, *Technology*. Teknologi yang dipilih akan menentukan keberhasilan proyek yang berbasis *e-government*. Semakin besar budget yang dialokasikan, maka pemakaian teknologi akan semakin canggih sehingga tingkat keberhasilan semakin tinggi dan tercapainya manfaat yang ditargetkan dalam implementasi proyek tersebut.
7. Elemen sukses yang kedelapan adalah *Innovation*, elemen terakhir ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Inovasi disini tidak hanya terbatas pada menciptakan produk namun bagaimana implementator mampu mengatasi segala permasalahan yang muncul dalam implementasi proyek yang ada (Larasati, 2019).

Adapun elemen sukses pengembangan *e-government* lain yang dikemukakan oleh Moon (2008, h.168) di dalam buku Sistem Informasi Manajemen karya Dr. Ir. Eko Nugroho yaitu *willingness* dan *local culture*. *Willingness* adalah kemauan. Kemauan di sini dapat diartikan sebagai komitmen yang muncul untuk melakukan sesuatu hal. Sebagai berikut:

Faktor atau elemen sukses penerapan *e-government* juga dapat dipengaruhi oleh *local culture* atau budaya lokal yang mempengaruhi di dalam kesuksesan penerapan *e-government* terkait dengan kemampuan dalam memasyarakatkan transaksi elektronik. Begitu juga dengan kesiapan dari masyarakat pengguna,

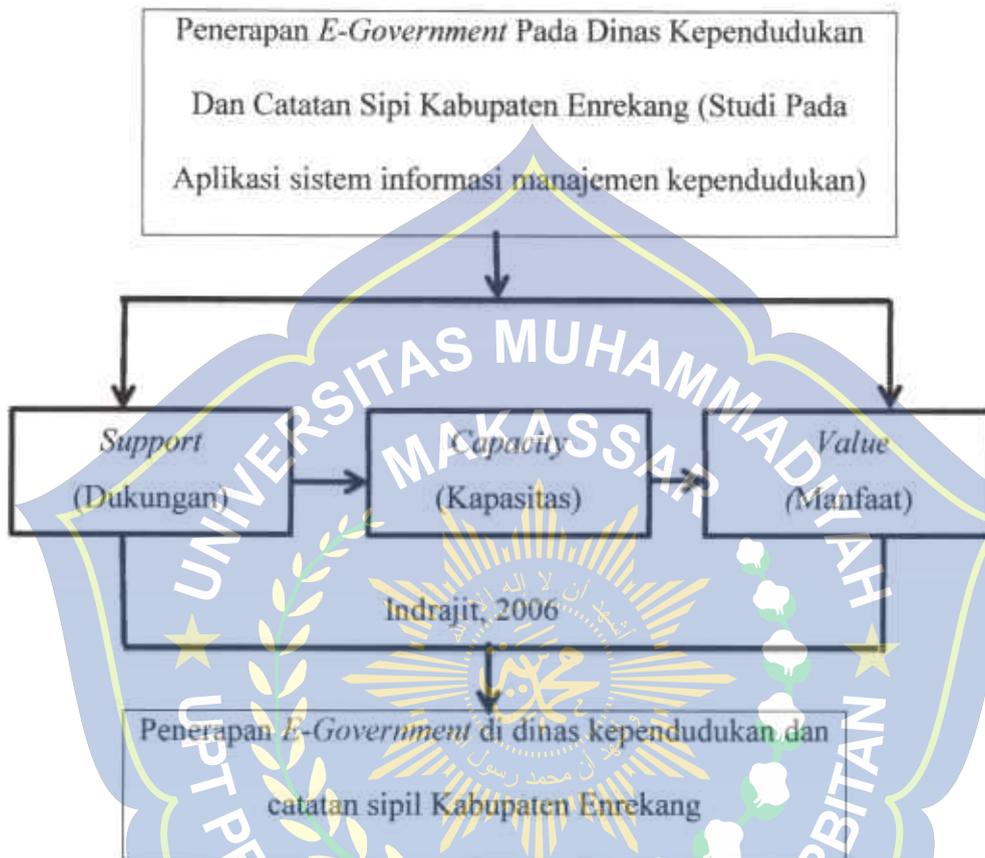
dimana berhubungan dengan kemampuan masyarakat di dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang terdapat di dalam penerapan *e-government* tersebut. Peran masyarakat di sini sangat memiliki pengaruh dalam pencapaian kesuksesan penerapan *e-government* (Anggana & Gani, 2015).

#### **D. Kerangka Pikir**

Menurut Sugiono (2017), mengemukakan kerangka berpikir merupakan bermodel konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi menjadi masalah yang penting.

Persepsi tentang kesiapan dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan penerapan *e-government* perlu disampaikan kepada publik melalui penjelasan yang komprehensif dan berkala, dengan menjelaskan apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah. Dukungan merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan *e-government*, kepercayaan publik perlu dibangun dan dijaga sejalan dengan pelayanan yang diberikan pemerintah.

### Kerangka Pikir :



#### E. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan *e-government* di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Enrekang.

#### F. Deskripsi Fokus Penelitian

##### 1. *Support* (Dukungan)

Dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang baik itu moril maupun material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan. Adanya kemauan pemerintah Kabupaten Enrekang menerapkan *E-government* dalam memberikan pelayanan publik dan dukungan semua pihak untuk penerapan *E-government*.

## 2. *Capacity* (kapasitas)

Adalah ketersediaan sumber daya finansial, yaitu adanya sumber finansial yang mendukung dalam penerapan *E-government*, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang menjadi kebutuhan utama dalam penerapan *E-government* dan yang terpenting ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

## 3. *Value* (Manfaat)

Adalah manfaat yang dirasakan oleh pemerintah. Yaitu manfaat yang di dapatkan oleh pemerintah dalam menerapkan *E-government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang itu sendiri dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna baru. Penelitian ini berlokasi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

##### 2. Waktu penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah seminar proposal yang bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, terkait *e-government*.

#### B. Jenis Dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif, adalah suatu cara atau strategi untuk memperoleh data dan fakta yang selanjutnya diolah untuk kepentingan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

##### 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskripsi analisis, yaitu penelitian yang di gunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah penerapan *e-government* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, penelitian diskripsi bertujuan untuk menggambarkan, meringkus berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas yang ada dalam masyarakat.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

#### 2. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal serta aturan-aturan yang berkaitan dengan judul penelitian.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang diminta keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3.1 Informasi Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Harwan Sawati,SE	HS	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang
2	Yusran	YS	Operator Pelayanan bidang IT
3	Anwar	AR	Masyarakat
4	Bayu Rianto	BR	Masyarakat
5	Paisul	PS	Masyarakat

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam metode penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Jika teknik pengumpulan data tidak dikuasai maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diinginkan sebagai penunjang penelitiannya, bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara.

Berikut ini adalah teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

#### 1. Observasi

Yaitu pengamatan langsung, kegiatan observasi dilakukan secara bersama. Secara umum kegiatan observasi dilakukan untuk merekam proses yang terjadi selama penelitian berlangsung. Mengingat kegiatan observasi menyatu dalam pelaksanaan tindakan, maka perlu dikembangkan sistem dan prosedur observasi yang mudah dan cepat dilakukan.

## 2. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung, dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

## 3. Dokumentasi :

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran. Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan ( seperti gambar, kutipan, guntingan Koran, dan bahan referensi lain).

## F. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang baik dan tampak jelas alur pikirnya adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena dengan penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting untuk menuju kearah jalan lincer untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah di analisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian.

### **G. Teknik Pengabsahan Data**

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat pengumpulan data dan menganalisis data, dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang yang berbeda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu terengulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisis data. Menurut Norman K. Denkin (2010), triangulasi meliputi beberapa hal yaitu :

#### **1. Triangulasi metode**

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey, untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.

## 2. Triangulasi sumber data

Adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui beberapa metode dan sumber perolehan data, misalnya selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bias menggunakan observasi terlibat dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti, berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang handal.

## 3. Triangulasi teori

ialah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis dan yang diperoleh.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan bagaimana penerapan *E-government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini disebut (MASSENREMPULU) yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari (ENDEG) yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan (ENDEKAN). Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Administrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama (ENREKANG) versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambungmenyambung mengambil + 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 km<sup>2</sup>.

##### a. Letak Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014'36" – 3050'0" Lintang Selatan dan antara 119040'53" – 12006'33" Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu



- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap

- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Gambar 4.1 Peta kabupaten Enrekang



Dilihat dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Kabupaten Enrekang berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tanah Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas tiga bahasa dari tiga rumpun etnik yang berbeda yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maroangin di Kecamatan Maiwa. Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km atau sebesar 2,83 % dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan 40 secara

keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan.

Tabel 4.1 kecamatan di Kabupaten Enrekang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Perentase (%)
1	Maiwa	392.87	21,99
2	Bungin	236.84	13,26
3	Enrekang	291.19	16,30
4	Cendana	91.01	5,10
5	Baraka	159.15	8,91
6	Buntu Batu	126.65	7,09
7	Anggeraja	125.34	7,02
8	Malua	40.36	2,26
9	Alla	34.66	1,94
10	Curio	178.51	9,99
11	Masalle	68.35	3,83
12	Baroko	41.08	2,30
	Kabupaten Enrekang	1786.01	100.00

Sumber: Dokumen RT/RW Kab. Enrekang (Tahun 2019)

Setiap kecamatan juga terdiri dari beberapa desa/kelurahan yakni, Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Bungin 6 desa, Kecamatan Enrekang 18 desa, Kecamatan Cendana 7 desa, Kecamatan Baraka 15 desa, Kecamatan Buntu Batu 8 desa, Kecamatan Anggeraja 15 desa, Kecamatan

Malua 8 desa, Kecamatan 41 Alla 8 desa, Kecamatan Curio 11 desa, Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.

b. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakatnya maka disusunlah visi Kabupaten Enrekang yaitu:

Enrekang Maju, Aman, Sejahtera ( EMAS) yang berkelanjutan dan Relegius

Kabupaten Enrekang untuk mewujudkan Visi diatas maka dirumuskan Misi untuk mensejahterakan masyarakat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas Dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan berimtaq.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa deskriminasi gender.
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri.
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

## **2. Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Enrekang nomor 05 tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan urusan kependudukan, pencatatan sipil dan penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya.

Adapun Visi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yaitu : “Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Tertib, Akurat Dan Dinamis Menuju Penduduk Yang Berkualitas. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Sistem Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin diwujudkan, yaitu :

1. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib.
2. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat.
3. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis.

Apabila Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertib, akurat dan dinamis maka dalam penyusunan rencana pembangunan dan dalam menentukan kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar. Guna mewujudkan visi tersebut maka terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu : "Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil" Untuk mewujudkan misi ini ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Aparatur yang terlibat didalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan dokumen kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan lancar.
- b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program SIAK merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diseluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut karena satu dan lain hal.

- c. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Meningkatkan kerja sama dengan pihak yang berwenang. Adapun jumlah penduduk yang penulis peroleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

### **3. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Enrekang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang.
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- i. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan.
- j. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan dibidang administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan dilingkungan pemerintah daerah.
- k. Pembinaan kepada masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil.
- l. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
- m. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal kebijakan kependudukan, tertib administrasi kependudukan dan analisis dampak kependudukan.
- n. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
- o. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data kependudukan

### 3. Profil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 1 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 05 mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Enrekang maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang yaitu terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi :

#### a. Sekretariat

- 1) Sub bagian umum serta kepegawaian
- 2) Sub bagian keuangan
- 3) Sub bagian perencanaan dan pelaporan

#### b. Bidang pendaftaran penduduk

- 1) Seksi identitas penduduk
- 2) Seksi perpindahan dan mutasi penduduk
- 3) Seksi pencatatan dan pelaporan identitas

#### c. Bidang pencacatan sipil

- 1) Seksi pembuatan akta kelahiran, kematian dan pengangkatan anak
- 2) Seksi pembuatan akta perkawinan dan pembatalan perkawinan
- 3) Seksi pencatatan dan pelaporan pelayanan akta pencatatan sipil

#### d. Bidang pengolahan data serta informasi administrasi kependudukan

- 1) Seksi administrasi analisa dan data dan informasi kependudukan
- 2) Seksi pengembangan aplikasi sistem kependudukan
- 3) Seksi dokumentasi dan proyeksi kependudukan

## **B. Penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

### **Kabupaten Enrekang**

Penerapan *E-Government* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan hak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dengan penerapan *E-government* dapat meningkatkan pelayanan publik melalui layanan yang cepat, tepat waktu dan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat dan adanya penerapan *E-government* maka akan mengurangi biaya operasional pemerintah sehingga pelayanan yang diberikan lebih efektif dan efisien terlebih pada saat ini dalam keadaan era pandemi covid-19.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan penerapan *E-government* untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan sehingga masyarakat diperlu lagi datang jauh-jauh ke kantor dalam mengurus data kependudukan yang dilakukan secara online. Perlu memperhatikan beberapa hal untuk memastikan bahwa dalam menerapkan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang telah berjalan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu diperhatikan elemen penerapan *E-government*. Adapun 3 elemen dalam penerapan *E-Government* diantaranya :

## 1. Elemen *Support*

Elemen *support* merupakan elemen yang paling penting dalam hal ini penerapan *E-Government*, sebab perlu dukungan dari instansi pemerintah agar konsep *E-Government* dapat diterapkan. Tanpa adanya keinginan dari instansi pemerintahan maka penerapan *E-Government* sangat sulit untuk diterapkan.

- a. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang terkait keinginan dalam menerapkan *E-Government* sebagai berikut :

“Mengenai soal penerapan *E-Government* (pelayanan secara online). Itu sebenarnya kami dari pihak pimpinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sudah beberapa tahun memulai penerapan *E-government* tetapi dilakukan secara bertahap, tapi pada saat datangnya Wabah Covid-19 kami dari instansi DUKCAPIL berusaha betul dalam memaksimalkan pelayanan secara online. Jika ditanya soal mengenai keinginan dalam menerapkan *E-Government* kami sangat mau menerapkan bahkan sudah melaksanakan penerapan itu.” (Hasil Wawancara penulis dengan HS Pada 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan HS, penulis menyimpulkan bahwa dalam menerapkan *E-government*, pimpinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dan pemerintah sudah sepakat dalam menerapkan E government dalam

membantu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ada di desa desa terpencil di enrekang juga mendapatkan pelayanan tanpa harus ke dinas kependudukan dan catatan sipil.

- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral. Berikut pula komentar mengenai *E-government* oleh YR Operator Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang:

“Penerapan *E-Government* melalui pelayanan online memang sudah beberapa tahun dilaksanakan bahkan hampir semua pelayanan sudah online kecuali pembuatan E-Ktp namun E-Ktp juga sudah bisa dilakukan di kantor-kantor kecamatan masing-masing yang dimana sudah ada staf dukcapil yang di tempatkan langsung di setiap kecamatan untuk pelayanan E-ktp, kami sengaja menempatkan pelayanan E-ktp di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang untuk memudahkan masyarakat yang jauh dari kantor DUKCAPIL atau yang ada di pelosok-pelosok dalam membuat E-ktp terlebih pada saat pandemic covid-19”. Hasil wawancara penulis dengan YR 22 November 2021).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi terait dengan anggaran dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan *E-Government* sudah berjalan dengan baik karna penambahan sumber daya manusia atau pegawai dukcapil sudah ada di setiap kecamatan yang ada di enrakang jadi masyarakat tidsk perlu lagi ke kota atau ke kantor dukcapil karna sudah ada pegawai yang melakukan opelayanan di kecamatan dan tentunya ini sangat membantu.

- c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government (seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga lembaga khusus, misalnya Detiknas di Indonesia sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya). Berikut pula komentar yang sama juga diberikan oleh masyarakat AR terkait tentang pelaksanaan penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang :

"Menurut saya dengan adanya penerapan *E-government* atau pelayanan online pastinya sangat membantu masyarakat dalam mengurus data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang terlebih lagi infrastruktur dsalam pelayanan ini seperti pengadaan computer dan wifi sudah ada di kecamatan jadi pelayanannya lebih cepat. (Hasil wawancara penulis dengan AR pada tanggal 23 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan AR penulis menyimpulkan bahwa adanya penerapan *E-Government* dan didukung dengan infrastruktur yang sudah diberikan pemerintah dan dukcapil seperti pengadaan computer wife dan prin yang lebih banyak memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

- b. Adanya aturan yang mendukung penerapan *E-Government* di instansi pemerintahan. Berjalan sistem kerja dalam suatu pemerintahan memerlukan aturan yang sangat mendukung penerapan sistem kerja tersebut dalam hali ini penerapan *E-Government*. Oleh sebab itu penerapan *E-government* di suatu instansi pemerintah memerlukan

aturan yang menaungi penerapan itu, sehingga sistem kerja tersebut bisa berjalan baik dengan aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan HS terkait dengan aturan yang berlaku:

“Mengenai tentang aturan itu sebenarnya sudah ada surat yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Enrekang tahun kemarin yaitu surat edaran mengenai implementasi Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan pasal 19 ayat 6 yang isinya itu Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah di tanda tangani secara electronic dan KTP-el tidak memerlukan legaliser, maksudnya ialah dokumen Kependudukan itu harus berbentuk file atau format sehingga masyarakat bisa langsung mencetak sendiri dengan menggunakan kertas yang sudah ditentukan yaitu kertas HVS 80 gram yang banyak dijual ditempat print masyarakat bisa print sendiri dirumah kalau mempunyai print dan kertas HVS tersebut” (Hasil wawancara penulis dengan HS pada tanggal 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan HS bisa disimpulkan bahwa aturannya di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan pada Pasal 6 ayat 6 yang bunyinya Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah di tanda tangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan Pelayanan legaliser. Pada dasarnya pemerintah telah memberlakukan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Support atau dukungan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang terkait mengenai penerapan E-

*Government* sudah dibidang sangat baik, dengan begitu dukungan yang diberikan seperti menempatkan beberapa pelayanan di Kecamatan yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Enrekang dan melakukan sosialisasi tentang *E-Government* dan memberikan fasilitas yang menunjang kinerja operator sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dan menjadikan program ini berjalan dengan baik.

## 2. Elemen *Capacity* (Sumber Daya)

Penerapan *E-Government* di suatu pemerintahan tentunya sangat memerlukan yang namanya sumber daya yang cukup untuk menjalankan inovasi tersebut, yang dimaksud sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya Finansial, Sumber daya Infrastruktur, dan sumber daya manusia yang cukup. Apa bila ketiga sumber daya tersebut sudah terpenuhi maka sangat menentukan berjalannya penerapan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sehingga dalam memberikan pelayanan dapat memudahkan para staff atau operator pelayanan.

### a. Sumber Daya Infrastruktur

Adanya Sumber daya infrastruktur teknologi informasi yang dimana ketersediaan infrastruktur ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan *E-Government* ini disuatu instansi pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan penerapan *E-Government* agar inovasi yang sudah dibuat menjadi kenyataan. Berdasarkan wawancara

penulis dengan salah satu staff atau operator pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang yaitu YR mengenai tentang sumber daya infrastruktur teknologi informasi sebagai berikut:

“Mengenai soal Infrastruktur disini sudah bisa dibilang sangat memadai, di loket pelayanan saja sudah tersedia 6 computer pelayanan yang terbagi dari loket 1 sampai 4 lengkap dengan komputer, disini juga sudah tersedia print, wifi, lain lagi yang ada di staf lain seperti tata usaha sudah 8 computer jadi mengenai soal infrastruktur teknologi informasi atau kebutuhan sehari-hari dalam memberikan pelayanan sangat memadai untuk melaksanakan penerapan *E-Government* atau Pelayanan secara online” (Hasil wawancara penulis dengan YR pada tanggal 22 november 2021).

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh HS yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tentang ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan penerapan *E-Government* (pelayanan secara online) tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan HS sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari sumber daya infrastruktur disini memang sudah dibilang sangat mencukupi, disini dalam hal pelayanan kami membagi 4 loket pelayanan yakni loket 1,2,3 dan 4 dengan pelayanan yang berbeda dan semuanya sudah menggunakan 6 komuputer juga disini sudah tersedia printer, wifi bisa dibilang lengkap kalau persoalan itu, dalam melaksanakan mungkin cuman sistem yang kami rubah karna mengenai kebutuhan online hampir sama saja”. (Hasil wawancara penulis dengan HS pada tanggal 23 November 2021).

Hal yang sama dikemukakan oleh BR yang terkait dengan ketersediaan sumber daya infrastruktur yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. adapun hasil wawancara penulis dengan BR adalah sebagai berikut:

“Menurut saya kalau masalah seperti itu, kalau saya lihat disini sudah banyak sekali computer, dan bisa saya bilang untuk menerapkan E-government atau pelayanan secara online sudah bisa di laksanakan dan juga sebenarnya sudah beberapa tahun ini disini Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Enrekang sudah menerapkan itu”. (Hasil wawancara penulis dengan BR pada 19 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan YR, HS dan BR diatas tentang sumber daya infrastruktur teknologi informasi dapat saya simpulkan bahwa teknologi informasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sudah sangat memadai untuk menerapkan *E-Government* atau pelayanan secara online yang dimana ketersediaan sumber daya infrastruktur teknologi merupakan sebagian dari kunci keberhasilan dalam menerapkan *E-government* atau pelayanan secara online ini.

#### **b. Sumber Daya Finansial**

Adanya sumber daya finansial yang mendukung penerapan *E-Government* karna faktor finansial itu sangatlah mendukung dan menentukan terpenuhinya sumber daya lainnya untuk menerapkan *E-Government* yang dimana dalam penerapannya tentunya membutuhkan dana finansial yang cukup besar karna menentukan tercapainya infrastruktur teknologi yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan HS mengenai sumber daya finansial sebagai berikut:

“Mengenai persoalan sumber dana itu sebenarnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, jika mengenai persoalan dana itu kita tidak perlu khawatir. Karna dalam penerapannya juga tidak terlalu membutuhkan dana yang besar karna hampir saja sama dengan seperti pelayanan yang offline sebab computer itu sudah tersedia jadi tidak terlalu membutuhkan dana yang besar

karna memang sudah ada”. (Hasil wawancara penulis dengan HS pada tanggal 23 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tentang persoalan sumber daya finansial saya menyimpulkan bahwa mengenai sumber daya finansial itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan menurut HS untuk menerapkan *E-Government* atau pelayanan secara online tidak memerlukan dana tambahan karna sama saja seperti pelayanan sebagaimana biasanya sumber daya infrastruktur sudah ada.

### **c. Sumber Daya Manusia**

Adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dalam menerapkan *E-Government*. Dalam menerapkan *E-government* pada dasarnya sumber daya manusia sangatlah begitu dibutuhkan dalam menggunakan teknologi informasi yang telah disediakan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan HS Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tentang Sumber Daya Manusia untuk menerapkan *E-Government* atau pelayanan secara online sebagai berikut:

“Kalau mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang kami memang menempatkan orang yang sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam melaksanakan tugas dan kami juga sering melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill dalam memberikan pelayanan, misalnya untuk bagian pelayanan di 4 loket yang berbeda kami menempatkan orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan dan sudah terbukti mereka bekerja sesuai dengan kapasitas. Kami juga menempatkan beberapa di tata usaha sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki". (Hasil wawancara penulis dengan HS tanggal 21 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan HS terkait dengan sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia sudah ditempatkan di bidang masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing dan dalam meningkatkan kemampuan itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sering melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan penerapan *E-government* dalam memberikan pelayanan. Hal yang juga dikatakan PS tentang sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, adalah sebagai berikut:

"Kalau saya lihat memang benar pegawai-pegawai atau para pekerja yang bekerja disana memang memiliki kapasitas atau kemampuan di bidangnya masing-masing jadi dalam menerapkan *E-Government* atau pelayanan secara online sudah sangat bisa diterapkan karna orang-orangnya sudah berkompeten di bidangnya masing-masing". (Hasil wawancara penulis dengan PS pada tanggal 19 November 2021)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan keduanya diatas saya menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sudah memiliki kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menerapkan *E-Government* atau pelayanan secara online kepada masyarakat yang sudah terbukti beberapa tahun ini.

*Capacity* atau Sumber Daya, Ketersediaan sumber daya untuk menerapkan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Enrekang baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya

finansial sudah cukup baik. Terkait dengan sumber daya manusia yaitu staff atau operator pelayanan telah dibekali dengan kemampuan atau skill dari latihan-latihan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sehingga dalam memberikan pelayanan tidak lagi mendapatkan masalah tentang pelayanan secara online. Mengenai dengan sumber daya finansial atau anggaran yang disediakan tidak perlu lagi dikhawatirkan karna sumbernya sudah jelas yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### 3. Elemen value (Manfaat)

Elemen value atau manfaat adalah elemen yang sangat menentukan besar manfaatnya bagi instansi Pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Enrekang itu sendiri sebagai pemberi atau yang menerapkan *E-Government* atau pelayanan secara online ditengan masyarakat dan besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ini dalam penerapan *E-Government* (pelayanan secara online) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Manfaat yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang yang dalam hal ini melakukan penerapan *E-Government* atau pelayanan secara online. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan HS dan YR sebagai berikut:

“Kalau menurut saya manfaat dari penerapan *E-Government* atau pelayanan secara online sangat besar manfaatnya apa lagi pada saat sekarang ini di era serba modern, karna pelayanan online ini bukan saja menjadi inovasi dalam pelayanan ini juga salah satu

strategi dimasa sekarang ini terlebih saat pandemi. Pendapat saya begini penerapan *E-Government* atau pelayanan secara online sangat efektif dan efisien untuk masyarakat dari segi pelayanan, masyarakat yang akan mengurus data kependudukan tidak usah lagi datang ke kantor terlebih yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Juga dalam hal ini sedikit mencegah penyebaran *covid-19*". (Hasil wawancara penulis dengan HS pada tanggal 22 november 2021)

Menurut HS dengan adanya penerapan *E-Government* atau pelayanan secara online membuat pelayanan untuk masyarakat itu lebih efektif dan efisien, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan dan ini juga dapat mengurangi penyebaran *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Hal yang serupa dikemukakan oleh YR yaitu operator atau staff pelayanan sebagai berikut:

"Kalau menurut saya memang pelayanan online ini begitu bagus karena begitu efektif dan efisien cara kerjanya begitu gampang masyarakat tinggal mengirim file yang dibutuhkan untuk mengurus data kependudukan melalui website atau resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dan bisa juga langsung melalui whatsapp yang telah disediakan, dan kemudian staff memproses berkas sesuai dengan dengan apa yang kita kirim dan juga bisa selesai pada hari itu juga, tetapi mungkin bisa mengalami keterlambatan jika jaringan bermasalah. Jadi sangat mudah dari segi pelayanan apalagi kita memilik 4 loket pelayanan yang terbagi sesuai dengan kapasitas masing-masing jadi sangat cepetlah kemudian masyarakat sendiri yang print dirumah jika mempunyai print dengan kertas HVS 80 gram yang sudah ditentukan bisa juga ditempat print jika tidak punya print. Semua melalui teknologi dan ini juga sangat memudahkan dan membantu masyarakat dalam mengurus data kependudukan". (Hasil wawancara penulis dengan YR pada 25 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan keduanya yaitu HS dan YR tentang manfaat yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sebagai yang memberikan pelayanan secara

online kepada masyarakat yaitu inovasi yang berbentuk pelayanan online ini memberikan dampak yang besar dari segi pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Sistem kerja yang menggunakan teknologi informasi atau *E-Government* membuat masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melakukan pelayanan ini juga bisa mengurangi penyebaran *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan untuk menerapkan *E-Government* atau pelayanan secara online. Adapun hasil wawancara penulis dengan Masyarakat (AR) terkait manfaat yang diterima dalam penerapan *E-Government* atau pelayanan secara online di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

"Iya ini mau mengurus kartu keluarga tapi saya disarankan untuk melakukan pelayanan secara online saja jadi cuman diarahkan untuk mengirim langsung ke nomor whatsapp dalam bentuk file yang memang sudah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. oleh karena itu tidak usah datang lagi ke kantor mengantri sampai menunggu lama hanya mendapatkan pelayanan tentu ini sangat memudahkan masyarakat terlebih yang jauh rumahnya dari kantor. Tentu ini manfaatnya sangat baik kepada masyarakat terlebih hingga saat ini masih terdampak *covid-19*. (Hasil wawancara penulis dengan AR pada tanggal 19 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AR tersebut terkait dengan manfaat penerapan *E-Government* atau pelayanan secara online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang penulis menyimpulkan bahwa sanya penerapan *E-government* atau pelayanan secara online memberikan kemudahan untuk masyarakat karna tidak perlu lagi datang ke kamtor untuk mengantri demi untuk mendapatkan pelayanan dan msyarakat juga menerima penerapan *E-Government* atau pelayanan

secara online memberikan manfaat yang begitu besar dan dampak yang baik untuk masyarakat sebagai yang menerima pelayanan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sebagai yang memberikan pelayanan dalam mengantisipasi masyarakat datang ke kantor terlebih disaat ini masa pandemic *covid-19*. Berikut juga yang disampaikan BR terkait tentang manfaat pelayanan secara online (*E-government*) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

"menurut saya dengan adanya pelayanan secara online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan pelayanan karna tidak perlu lagi jauh-jauh untuk datang ke kantor apa lagi kita yang ada dipelosok yang jauh dari kantor sampai antri dan lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan dan dengan pelayanan secara online tentu sangat bermanfaat kepada masyarakat dalam hal pelayanan apa lagi masih dalam keadaan wabah *covid-19* dan ini juga termasuk untuk mencegah penularannya (Hasil wawancara penulis dengan PS pada tanggal 22 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PS mengenai tentang manfaat dalam nline ini penerapan *E-government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pelayanan online ini sangat berguna bagi masyarakat karna tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor untuk menerima pelayanan tapi bisa dilakukan secara online dan membantu juga mengurangi penularan *covid-19* saat ini.

## C. Hasil Pembahasan

### 1. *Support* (Dukungan)

Dukungan yang dimaksud adalah dukungan atau keinginan dari pemerintah dalam menerapkan *E-Government*. Merupakan yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan atau dukungan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan *E-Government*. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah, berbagai inisiatif dalam menerapkan *E-Government* akan sulit berjalan, adapun dukungan atau aturan yang mendukung dalam menerapkan *E-government* yaitu surat edaran mengenai implementasi PERMENDAGRI Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan pasal 19 ayat 6 yang isinya itu dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah di tanda tangani secara electronic dan KTP tidak memerlukan legaliser.

Hal yang terpenting adalah dukungan unsur pemerintah. Pimpinan harus memiliki keinginan politis dalam menerapkan *E-Government*, karena hal ini akan meyangkut seluruh proses dari *E-Government*. Artinya pemimpin tidak saja harus pintar dalam menyusun konsep, tetapi juga harus menjadi motivator ulang pada fase pelaksanaannya sehingga dalam penerapannya berjalan dengan mulus.

### 2. Capacity ( Sumberdaya)

Element Capacity adanya unsur kemampuan atau sumber daya untuk menerapkan *E-Government*, penerapan *E-government* disuatu

pemerintahan sangatlah memerlukan sumber daya yang cukup untuk menjalankan inovasi tersebut baik itu sumber daya finansial, sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia. Apa bila ke tiga sumber daya tersebut sudah terpenuhi maka menjadi kunci mewujudkan impian *e-government* menjadi kenyataan. tiga hal sumber daya dalam menerapkan *E-Government* diantaranya:

a. Sumber daya manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi penerapan *E-government* yaitu sumber daya manusia yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang masing-masing dalam melakukan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu. Dikarenakan proses penerapan *E-government* memerlukan dukungan dari semua pihak baik dari sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya infrastruktur untuk menerapkan *E-government*.

b. Sumber daya finansial

Selain dari SDM yang mempengaruhi dalam menerapkan *E-government*, sumber daya finansial juga sangatlah dibutuhkan dan menentukan terpenuhinya sumber daya yang lain dalam terwujudnya pelayanan secara online untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

c. Sumber daya infrastruktur

Dimana ketersediaan infrastruktur ini menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan *E-government* yang dimana

sumber daya ini diperlukan dalam pembangunan dan penerapan *E-government* ini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

### 3. Value (manfaat)

merupakan aspek yang ditinjau dari sisi tuntutan masyarakat (*demand side*) manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan dengan adanya pelayanan secara online ini begitu bermanfaat kepada masyarakat karena masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor mealkukan pelayanan data kependudukan cukup melalui website dan watshapp Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Manfaat yang dirasakan pemerintah dalama hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dengan adanya pelayanan secara online sangatlah efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan ini juga dapat mencegah penularan *covid-19* pada saat ini, berbagai inisiatif dalam penerapan *E-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat yang sebagai penerima pelayanan dan mereka yang berkepentingan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Penerapan *E-Government* Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan). Dalam menerapkan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang ada tiga elemen yang dilihat dalam penerapan *E-Government* diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Elemen support

Disimpulkan bahwa indicator element support dalam penerapan elektronik government di kabupaten enrekang tepatnya di dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan hasil wawancara itu masih kurang maksimal dikarenakan bebeapa poin dalam elemen suppr tidak di implemntasikan dengan baik sehingga memperlambat kinerja dari dinas untuk menerapklan e government di seluruh kantor yang ada dikab enrekang. Hasilnya di tengah covid penerapan e government semakin lambat padahal jika merujuk pada aturan menteri dalam negeri nomor 104 tahun 2019 tentang pendokumntasian administrasi kependudukan itu merupakan aturan wajib yang harus di lakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memudahkan masyarakan mendapatkan pelayanan mendapatkan KTP melalui penerapan e government.

### 3. Elemen Capacity

Mengenai elemen capacity disimpulkan bahwa penerapan konsep ini sudah lumayan baik dari segi anggaran juga sudah ada aturan yang memang di buat untuk menerapkan elektorinik government sehingga memudahkan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam menjalankan tugasnya selanjutnya dari tersedianya sumber daya infrastruktur teknologi seperti pengadaan computer prin dan wifi sangatr membantu dan memaksimalkan kinerja pegawai dinas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga semua masyarakat bias mendapatkan pelayanan dengn cepat.

### 3. Elemen Value

Dapat disimpulkan bahwa Elemen value atau manfaat yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan penerapan *E-Government* atau pelayanan secara online kepada masyarakat, penerapan ini memberikan dampak yang begitu besar dari segi pelayanan yang efektif dan efisien. Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yakni memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan dan tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor untuk mendapatkan sebuah pelayanan.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut dikemukakan saran atau masukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dan masyarakat:

- a. Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang perlu lagi bagaimana meningkatkan penerapan elemen support didalam membantu memaksimalkan dan mempercepat penerapan *E-government* sehingga konsep *e-government* ini bisa membantu pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta pemerintah juga harus lebih memberikan perhatian terkait konsep elemen capacity seperti anggaran dan infrastruktur pengadaan barang yang di perlukan dalam pelayanan itu harus di penuhi.
- c. Penerapan E-Government bagi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dalam konsep elemen Value sangat berdampak baik dari segi pelayanan kepada masyarakat karena dengan diterapkannya E-Government dapat mempermudah atau tugas dari pegawai lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016). *Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol.3, No.1. . <https://doi.org/10.26785/jipk.v3i1.2367>
- Ahmad, A. (2012). *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi*. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13, 137–149. <https://doi.org/10.3386/w18571>
- Anggana, Y. P., & Gani, A. Y. A. (2015). *Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang*. *Administrasi Publik*, 3(1), 80–88.
- Budiman, H. (2017). *Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 , No.1. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2095>
- Cantika, D., & Rfs, H. T. (2021). *Elemen Sukses Pelaksanaan E-Government dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.9, No.1.
- Darmawan, E. (2015). *Implementasi E-Goverment Dalam Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan Pada kantor Urusan Agama Berbasis WEB*. *Jurnal Cloud Information*, 1, 15–22.
- Dede Abdurahman, T. F. P. (2018). *Analisis Dan Perancangan E-Goverment Dalam Transparansi Sistem Pemerintah Desa( Studi Kasus : Desa Tenjo Layar dan Desa Tanjung Sari Majalengka )*. *Jurnal Mnemonic*, Vol.5, No.1. <https://doi.org/10.14421/jm.v5i51.1461>
- Gea Cita Meiratri, Bambang Irawan, M. Z. (2020). *Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Berbasis E-Library Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan*. *Of Policy Dan Bureacracy Management*, 1.
- Hardjaloka, L. (2014). *Studi Penerapan E-Goverment Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik*. *Jurnal Rechts Vinding*, 3.

- Indrajit, (2006). *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM
- Irawan, B. (2013). *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Paradigma*, 2(1).
- Juliarso, A. (2019). *Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume.10 No.1, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1417>
- Kurniawan, R. C. (2017). *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Jurnal Fiat Justisia*, Vol.10, No.3, 569–586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Larasati, D. C. (2019). *Analisis Elemen Sukses E-Government Dalam Implementasi Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah ( Sampade ) Kota Malang*. *Nasional*, 2(Ciastech), 93–100.
- Mariano, S. (2019). *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 2, No.1 <https://doi.org/10.15321/jkp.v1i1i1.1821>
- Nadila Olivia Intan Putri, H. W. (2018). *Manajemen Electronic Government Di Kabupaten Semarang*. *Administrasi Publik*, 1–12.
- Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, S., & Irwansyah, I. (2018). *E-Government Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business)*. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, Vol.11, No.1, 37. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1371>
- Nugraha, J. T. (2018). *E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, Vol.2, No.1, 32–42. <https://doi.org/21.12811/kkm.v22i1.4232>

- Purwaningsih, E. H. (2017). *E-Goverment Dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2).
- Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). *Implementasi E-Goverment Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3).
- Saefudin, A. (2008). *Perkembangan Teknologi Komunikasi: Perspektif Komunikasi Peradaban*. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol.9, No.2. 383–392. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1113>
- Sudarsono, B. G., & Lestari, S. P. (2018). *Kajian Literatur Model Konseptual Keberhasilan E-Government*. *Jurnal KOMIK*, Vol.2, No.1 491–498.
- Supriyanto, E. E. (2016). *Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438>
- Wirawan, V. (2020). *Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia*. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol.1, No.1, 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>
- Yulinar Ayu Setiani, Dra. Maesaroh, M. S. D. (2016). *Analisis pengembangan e-government di kabupaten kendal*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 9. <https://doi.org/10.15526/jap.v1i1i9.1391>
- Yayat, R. (2017). *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping*. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, Vol.4, No.2 56–65. <http://eprints.uny.ac.id/17523/1>





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 863388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Yahya  
NIM : 105041115817  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 1 Agustus 2022  
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

  
M. S. Hirm, M.P.  
NBM. 964 591

BAB Iyathya: 105641115817

ORIGINAL SOURCES



PRIMARY SOURCES:

Rank	Source	Percentage
1	staff.unila.ac.id	5%
2	ois.unikom.ac.id	4%
3	ois.unin1.ac.id	2%

Exclude: nil

Exclude: matches

Exclude: similarity



BAB II Wahyu 105641115817

ORIGINAL



SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	4%
2	ojs.umrah.ac.id	3%
3	matondang.wordpress.com	2%
4	journal.umy.ac.id	2%
5	jurnal.uin-tapsel.ac.id	2%
6	Marudur Pardapotan Damanik, Erisva Pakini Purwaningsih: "E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS KUALITAS INFORMASI WEBSITE KABUPATEN BENGKALIS PROPINSI RIAU)", Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 2017 Publication	2%
7	journal.feb.unmul.ac.id	2%



BAB III yahya 105641115817

ORIGINALITY REPORT



10%  
SIMILARITY INDEX

11%  
INTERNET SOURCES

7%  
PUBLICATIONS

0%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 idunggededotcom.wordpress.com 2%
- 2 jurnalmanasiswa.unesa.ac.id 2%
- 3 sangit25.blogspot.com 2%
- 4 yolaziviani nonita.blogspot.com 2%
- 5 blogkelas6c.blogspot.com 2%

Exclude

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB IV yehya: 105641115817

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Binus University International 3%
- 2 dprnptspuiselpro.go.id 2%
- 3 eprints.unm.ac.id 2%
- 4 www.is.unn.ac.id 2%

Exclude matches Exclude matches



BAB V hanya: 105641115817

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES:

1

ppid.blitarkan.go.id

2%

2

tetnok1242.blogspot.com

2%

Exclude quotes

Exclude formatting



## Gambar Surat Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Soebei Alauddin No. 219 Telp. 86672 Fax 0411 865385 Makassar 90221 E-mail: lp@unimuh.ac.id

Nomor : 5000/05/C 4-VIII/XI/43/2021

11 Rabiul Akhir 1443 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

16 November 2021 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu  
di-

Enrekang

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1642/SP-A 1-I/XI/43/2021 tanggal 16 November 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : YAHYA

No. Stambuk : 10564 1115817

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Penerapan E-Government pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 November 2021 s/d 17 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079*

**ENREKANG**

Enrekang, 19 November 2021

Nomor : 608/DPMPTSP/IP/XI/2021  
 Kepada :  
 Eampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala DISDUKCAPIL Kab. Enrekang,  
 Di-  
 Enrekang

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 5000/05/C.4-VIII/XI/43/2021, tanggal 16 November 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yahya  
 Tempat Tanggal Lahir : Salongge, 26 Juli 1998  
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Salongge Desa Kendean Kec. Baraka

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "*Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)*".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 19 November 2021 s/d 17 Januari 2022

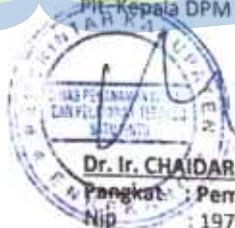
Pengikut/Anggota :

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG  
 Plt. Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang



**Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST.MT**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth:

1. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
2. Kepala BAKESBANG POK Kab. Enrekang
3. Camat Enrekang
4. Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Yang Berhubungan (Yahya).
6. Peringat



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Pasar Baru Nomor 07 ☎ 0424 21019 email dukcapileg@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 39 Ddukcapil / XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARWAN SAWATI, SE  
 NIP. : 19670329 198612 1 001  
 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Menerangkan Bahwa :

Nama : YAHYA  
 Tempat, tgl lahir: Salongge, 26 juli 1998  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat: Dusun Salongge, Desa Kendenan, Kec. Baraka

Benar Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi System Informasi Manajemen Kependudukan) mulai tanggal 19 November s/d 23 November 2021, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Enrekang.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 23 November 2021

Kepala Dinas,

**HARWAN SAWATI, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP:19670329 198612 1 001



Contoh tanda tangan Elektronik (Barcode)

KARTU KELUARGA  
No. 7316022604190006

KECAMATAN GOWA  
KABUPATEN GOWA  
KOTA BONTOLINGGAE

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Keanggotaan
1	Harwan Sawati, SE	196703291986121001	Pria	29/03/1967	Islam	S1	Manajemen	RT/RW
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...

Disiapkan Tanggal: 15/04/2024  
LEMBAG: 1. Kepala Keluarga, 2. RT, 3. Desa/Kelurahan, 4. Kecamatan

KEPALA DESA LOMBOK

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

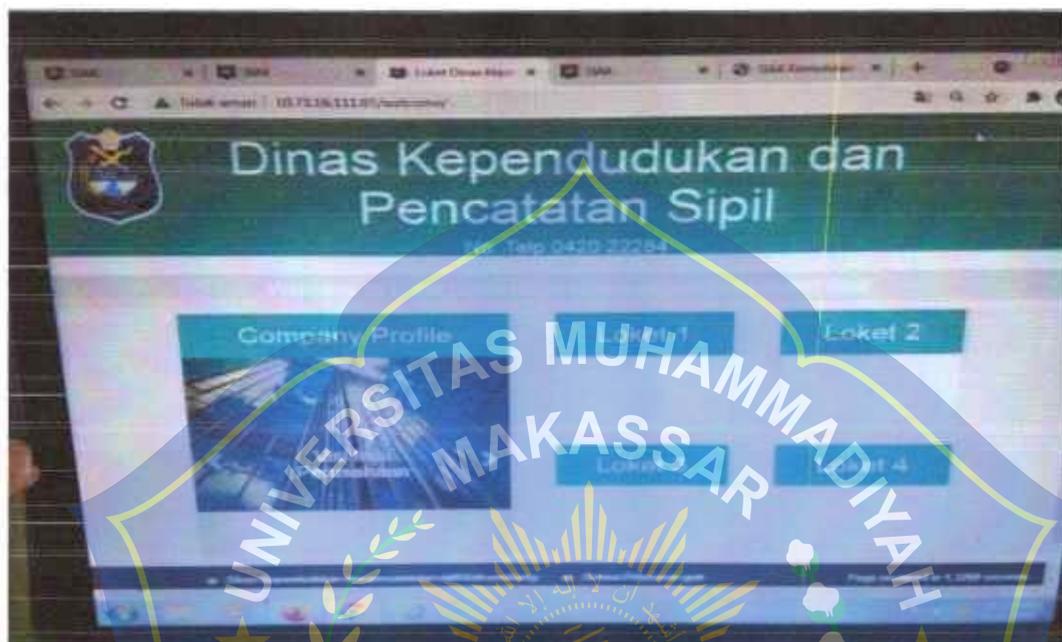
QR CODE

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

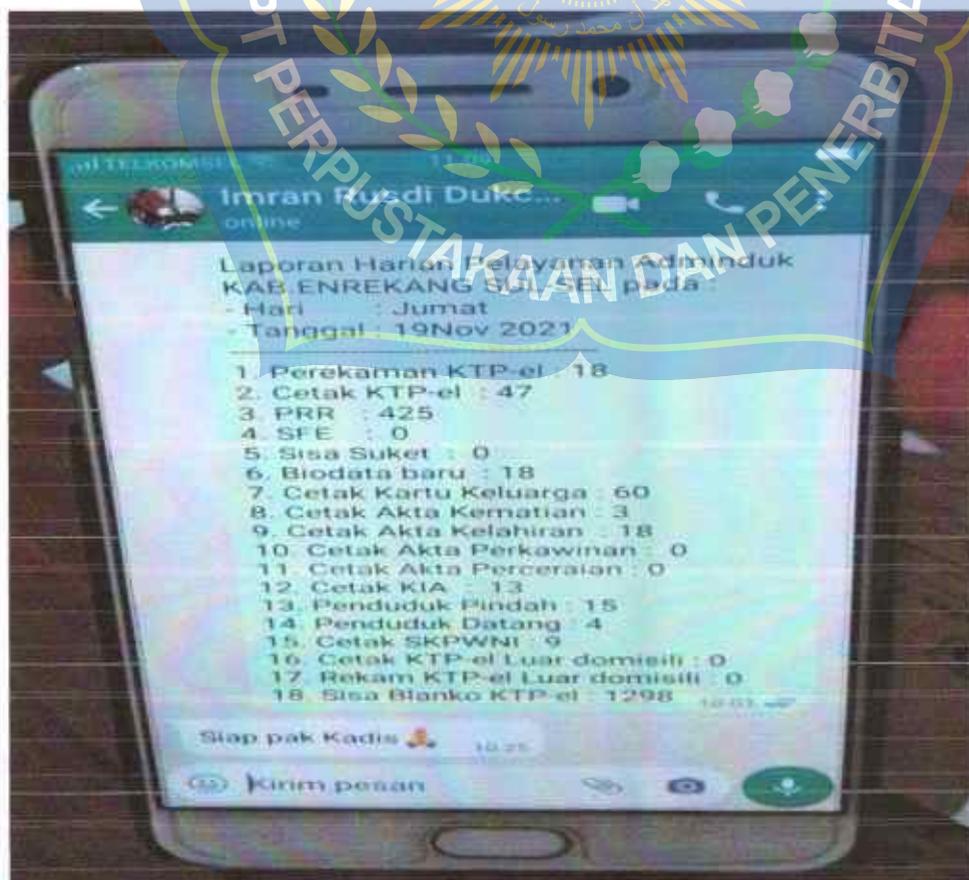
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Contoh Kartu Keluarga Dengan Tanda Tangan Elektronik (Barcode)

## Loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang



Contoh laporan Kepala Dinas secara online melalui (Whatsapp)



Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kab.Enrekang



Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan DUKCAPIL. Kab. Enrekang



Wawancara dengan Bapak Harwan Sawati S.E Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (tanggal 19 November 2021)



Wawancara dengan Anwar (Masyarakat) pada Tanggal 22 November 2021)





Wawancara dengan Kak Yusran selaku Operator Pelayanan pada (tanggal 23 November 2021)

## RIWAYAT HIDUP



Yahya, atau akrab disapa yaya, lahir di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 juli 1998. Penulis merupakan anak ke enam dari Bapak Laupa dan Ibu Nuraini, Menempuh Pendidikan di SDN 22 Salongge tahun 2004-2011, SMP PPM Tana Toraja tahun 2011-2014, MA PPM Tana Toraja tahun 2014-2017, Pada tahun yang sama penulis terdaftar menjadi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan dan tamat pada tahun 2022.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **"PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG (STUDI PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN)"**